

MASA DEPAN PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA REFLEKSI KESEJARAHAN

Saifuddin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
saif_struggle@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini mencoba mengeksplorasi bagaimana masa depan partai Islam di Indonesia dalam konteks kesejarahan. Dengan menggunakan metode penelaahan historis dicoba untuk menjelaskan mengapa partai Islam di Indonesia selama ini tidak pernah memperoleh kemenangan meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Hasil menunjukkan bahwa dalam masyarakat Muslim Indonesia sendiri terdapat beberapa variabel, dan tidak tunggal apalagi dalam pilihan politik, selain itu realitas sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa wacana dan simbol keagamaan belum bisa dijadikan *entry point* untuk merebut dukungan pada partai politik Islam atau yang bernuansa Islam. Upaya politik yang mengedepankan dimensi substantivistik daripada formalistik-legalistik bisa menjadi salah satu opsi bagi masa depan partai politik Islam.

Kata Kunci : Islam, Partai Politik, masa depan

Abstract

This paper attempts to explore how the future of Islamic parties in Indonesia within a historical context. By using the method of historical study attempted to explain why Islamic parties in Indonesia have not been to victory even though the majority of Indonesia's population is Muslim. results showed that the Indonesian Muslim community itself there are a few variables, and not much less in a single political choice, in addition to the reality of Indonesia's political history shows that the discourse and religious symbols can not be used as an entry point to win the support of Islamic political party or the nuances of Islam. Efforts to promote political dimension rather than formalistic-legalistic substantivistik could be one option for the future of Islamic political parties.

Keywords: *Islam, Political Parties, the future*

Hubungan antara negara dan Islam telah lama menjadi subjek yang rumit dan kontroversial di dunia Muslim. Sudah sejak zaman klasik, sarjana Muslim memperbincangkan masalah ini, sebagaimana telah didiskusikan di dalam kitab-kitab *fiqh*. Pada era modern ini, terutama pada abad ke-21, perdebatan ini mencapai dimensi yang baru karena intensitas kontak dengan gagasan Barat mengenai pemisahan agama dan negara.

Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di

dunia, gagasan tentang hubungan negara dan agama (Islam) atau hubungan politik dan Islam telah berlangsung secara dinamis sejak zaman kolonial. Pada era pasca kolonial hubungan tersebut mengalami dinamikanya tersendiri yang oleh para pakar politik diklasifikasikan ke dalam beberapa macam. Rahmani Timorita Yulianti yang mengutip pendapat Abd. Azis Taba menyatakan bahwa hubungan negara dan Islam pada Orde Lama bersifat antagonis, kemudian berubah menjadi

resiprokal kritis sejak adanya inisiatif proses pemahaman posisi keduanya (1982-1985), kemudian dari tahun 1985-1998 bersifat politik akomodatif.¹

Setelah runtuhnya Orde Baru dan munculnya suatu era yang kemudian dikenal dengan era reformasi, kebijakan pemerintah BJ. Habibie yang menghapus kewajiban penggunaan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi sosial politik menyebabkan banyak bermunculan partai-partai baru yang di antaranya menggunakan Islam sebagai asasnya. Tercatat misalnya nama-nama partai seperti PPP, PBB, PK, dan lain sebagainya.

Perkembangan semacam itu tentunya sangat menggembirakan. Namun demikian, realitas hasil Pemilu 1999 (Pemilu pertama pasca diperbolehkannya penggunaan asas lain selain Pancasila) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim tidak menjamin bahwa partai-partai Islam memperoleh dukungan mayoritas. Justru PDIP yang bukan partai Islam menjadi partai pemenang pemilu pada tahun 1999.

Pada pemilu tahun 2004, hasil pemilu tidak jauh berbeda. Pemenang pemilu pada tahun 2004 adalah partai Golkar yang juga bukan partai Islam dan bahkan partai *status quo* (Orde Baru) yang seakan-akan menjadi *common enemy*

pada era reformasi. Bahkan PBB yang sebelumnya menempati ranking keenam secara mengejutkan pada pemilu 2004 turun sangat drastis, meskipun ada perkembangan lain yang sangat mengejutkan dari PKS (sebelumnya PK) yang sebelumnya hanya mampu memperoleh dukungan kurang dari 2 % pada pemilu 1999 dan karenanya tidak lolos *electoral treshold* menjadi partai yang memperoleh kenaikan dukungan yang sangat luar biasa hingga mencapai lebih dari 600 %.

Berdasar pengalaman sejarah perpolitikan di negeri ini, penulis berasumsi bahwa partai yang menggunakan embel-embel agama, termasuk Islam, tidak akan pernah menjadi partai pemenang pemilu. Dengan demikian menjadi pertanyaan besar bagaimana masa depan partai politik Islam di negeri ini, khususnya pada pemilu tahun 2009 nanti. Perlukah mempertahankan strategi politisasi agama untuk memperoleh dukungan penduduk yang katanya mayoritas Muslim ini atau justru sebaliknya harus meninggalkan embel-embel agama karena hal demikian ternyata juga tidak mampu membuat penduduk Muslim tertarik memilihnya malah sebaliknya ketika partai politik Islam tidak 'laku dijual' akan tambah mendiskreditkan Islam sebagai agama terbesar di negeri ini.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian menggugah penulis untuk sedikit melakukan analisa berdasarkan kemampuan yang penulis miliki kemudian penulis tuangkan dalam tulisan sederhana ini.

¹ Rahmani Timorita Yulianti, *Reaktualisasi Strategi Politik Islam Di Indonesia*, Al Mawarid, edisi ke-7, (Yogyakarta: FIAI Jur Syari'ah, 1999) hlm. 93-94. Baca juga disertasi Bahtiar Effendi, *Islam And State: The Transformation Of Political Ideas And Practices In Indonesia*, alih bahasa Ihsan Ali Fauzi, (Jakarta: Paramadina, 1998).

Partai Politik Islam, Definisi dan Klasifikasinya

Menurut Arsekal Salim dalam penelitiannya, partai politik Islam khususnya di Indonesia, adalah partai yang menggunakan label Islam (nama, prinsip, dan simbol), atau tidak menggunakan label Islam tetapi perjuangan sebenarnya adalah terutama untuk kepentingan umat Islam tanpa mengesampingkan kepentingan non-Muslim, atau tidak menggunakan label Islam, programnya juga untuk kepentingan semua penduduk Indonesia, tetapi konstituen utamanya berasal dari umat Islam.²

Berdasarkan definisi dan kategori yang dibuat Arsekal Salim di atas, maka yang termasuk partai Islam kategori pertama semisal PPP, PBB, dan PKS. PPP menggunakan asas Islam dan memakai simbol Ka'bah yang merupakan simbol yang sakral dalam Islam. PBB juga demikian, asasnya Islam, lambangnya bulan sabit dan bintang. Kemudian kategori kedua dan ketiga seperti PKB dan PAN. Kedua partai tersebut tidak menggunakan asas Islam, tidak menggunakan simbol Islam, tetapi bahwa keduanya merupakan partai Islam dan konstituen utamanya umat Islam juga tidak bisa terbantahkan.

Hampir mirip dengan pemetaan Arsekal Salim, Muchammad Yuliyanto membagi entitas parpol Islam ke dalam dua konsepsi. *Pertama*, parpol Islam adalah parpol yang memiliki asas kepartaian

Islam dengan kepemimpinan partai di bawah kendali orang-orang yang tidak diragukan keislamannya. Di samping itu, partai tersebut mengusung simbol-simbol keislaman dari tanda gambar sampai ke jargon-jargon politik. Partai demikian juga menamakan diri sebagai partainya orang Islam. Sekadar contoh adalah PPP, PBB, PUI, PSII, Masyumi sampai PUMI. Kedua, parpol yang secara asas, simbol, jargon dan perilaku keseharian amat jauh dari warna Islam. Akan tetapi secara kepemimpinan di bawah kendali orang-orang beridentitas keislaman. Biasanya parpol demikian mengedepankan diri sebagai partai terbuka, namun memiliki basis konstituen umat Islam dan ormas keagamaan tertentu. Misalnya PKB dan PAN. Rasanya akhir-akhir ini Partai Golkar diidentifikasi sebagai "parpol Islam" hanya lantaran kepemimpinannya di bawah Akbar Tanjung yang juga mantan ketua umum PB HMI.³

Partai Politik Islam Era Orde Baru

Pemberontakan 30 September PKI merupakan perubahan pertama dalam dunia politik Indonesia. Peristiwa tersebut juga merupakan keruntuhan awal kekuatan Orde Lama dan dimulainya era kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto. Angkatan Darat (AD) yang merasa sangat berjasa dalam meruntuhkan kekuasaan Orde Lama dan menghancurkan komunis dan antek-anteknya melakukan banyak perubahan dalam dunia perpolitikan Indonesia dan melakukan rekayasa politik dan sosial untuk

² Arsekal Salim, *Partai Islam Dan Relasi Agama-Negara*, (Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, 1999) hlm. 8.

³ Muchammad Yuliyanto, *Meneropong Masa Depan Parpol Islam*, Suara Merdeka, 6 Juni 2002.

menghegemoni kekuasaan. Indikasinya adalah peranan ABRI (sekarang TNI) yang besar dalam panggung politik. ABRI dan pendukungnya bisa melakukan apa saja untuk melindungi kepentingannya.

Berbicara tentang politik Islam, pemerintah melakukan apa yang disebut “deislamisasi” atau “depolitisasi”. Politik Islam tidak hanya dibatasi dalam ruang geraknya, tetapi juga ditempatkan dalam posisi yang sejajar dengan komunisme melalui penamaan ekstrim kanan untuk politik Islam dan ekstrim kiri untuk komunisme.⁴

Masyumi yang didirikan lagi oleh tokoh-tokoh Islam dipersulit oleh pemerintah. Soeharto secara eksplisit menolak keinginan politik Masyumi yang dituangkan dalam sebuah surat mantan pemimpinnya, Prawoto Mangkusasmito, untuk merehabilitasi reputasi Masyumi. Akhirnya, aktivis Masyumi harus berjuang dengan cara lain agar supaya-keinginan mereka untuk mendirikan masyumi baru diterima oleh pemerintah. Tentu dengan mengakomodasi keinginan penguasa pada saat itu.

Melalui perjuangan yang berat, partai politik Islam yang bernama “PARMUSI” akhirnya bisa didirikan pada bulan Februari 1968 di bawah kepemimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun, dua orang pegiat terkemuka dari Muhammadiyah. Namun kemudian pemerintah melakukan rekayasa politik dengan membuat konflik internal

dalam partai melalui manuver politik H.J. Naro, sehingga Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun harus tersingkir dan digantikan M. S. Mintaredja, seorang yang akomodatif terhadap pemerintah.⁵

Kebijakan utama pemerintah Orde Baru adalah mengimplementasikan pembangunan nasional. Dalam ranah politik, pemerintah berinisiatif merestrukturisasi sistem politik dan menyederhanakan partai politik. Pemerintah berpendapat bahwa partai politik merupakan sumber konflik dan ketidakstabilan politik sebagaimana pengalaman selama masa demokrasi liberal. Oleh karena itu, penyederhanaan partai politik juga bisa dilihat sebagai cara sistematis untuk mengontrol partai-partai dan menghalanginya dari menjadikannya musuh politik pemerintah dan faktor yang mengganggu pembangunan nasional.

Langkah untuk menyederhanakan partai-partai politik adalah dengan menyatukan semua partai menjadi tiga fraksi di DPR. *Pertama*, F-PP yang terdiri dari empat partai politik Islam (NU, Parmusi, PSII, dan Perti). *Kedua*, F-DP yang terdiri dari PNI, Parkindo, partai Katolik, IPKI dan Murba. *Ketiga*, F-KP yang terdiri dari Golkar dan anggota Golkar yang ditunjuk. Di samping itu, masih ada fraksi lain yaitu fraksi ABRI, fraksi non-politik.⁶

Strategi lain yang diformulasikan oleh pemerintah Orde Baru untuk menata kembali kehidupan perpolitikan adalah *floating mass* (massa mengambang).

⁵ *Ibid.*, hlm. 48.

⁶ Umaid Radi, *Strategi PPP 1973-1982*, (Jakarta: Integrita Press, 1998) hlm. 77.

⁴ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003) hlm. 46.

Tujuannya untuk mengalihkan rakyat dari konsentrasi ideologis dan politis. Kebijakan *floating mass* ini secara serius sangat berpengaruh terutama terhadap PPP. Diyakini juga kebijakan tersebut dapat memotong hubungan PPP dengan pendukung fanatiknya terutama dari lingkungan NU di daerah-daerah pedesaan.⁷

Strategi tersebut memang berhasil dengan baik. Pada pemilu 1977, Golkar memperoleh 62,11 % dari total suara, sementara PPP hanya memperoleh 29,29 % dan PDI memperoleh 8,60 % dari total suara.

Secara umum, sepanjang kaitannya dengan politik Islam, harapan-harapan politisi Muslim tidak pernah terwujud. Setelah mampu memecah suara umat Islam Indonesia terhadap partai-partai Islam, pemerintah Orde Baru mulai merubah sikap dan kebijakannya terhadap partai-partai Islam menjadi politik akomodatif (1985-1998). Apalagi setelah berdirinya ICMI dan MUI. Namun sebenarnya, pemerintah Orde Baru hanya ingin mengeksploitasi Islam dan umat Islam Indonesia sebagai alat untuk mencapai agenda politiknya. Mereka tidak benar-benar memenuhi keinginan dan kepentingan umat Islam khususnya kepentingan politiknya.

Partai Politik Islam Era Reformasi

Menjelang keruntuhan Orde Baru, hubungan Islam dan negara sangat mesra.

⁷ Sudartono Abdul Hakim, *The Partai Persatuan Pembangunan The Political Journey Of Islam Under Indonesia's New Order (1973-1987)*. Institute of Islamic Studies, Mc Gill University, Montreal, Canada. hlm. 39-40.

Tidak heran kalau banyak pengamat tentang Indonesia menggambarkannya sebagai proses 'santrifikasi'. Melihat realitas politik yang semacam itu, nampaknya politik Islam akan tetap mendukung kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai reformasi politik. Namun ternyata dugaan tersebut meleset jauh akibat munculnya fenomena politik tanah air yang berubah dengan cepat. Pasca turunnya Soeharto dan kemudian diserahkannya kekuasaan kepada wakilnya, Habibie, ternyata Habibie mengeluarkan kebijakan yang sangat menguntungkan pihak Islam dalam aspek politik yaitu dihapuskannya kewajiban menggunakan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik.

Fenomena lain adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Aminuddin ketika menggambarkan posisi dan ekspresi perubahan kekuatan politik Islam di era reformasi. Menurutnya menjelang memasuki tahun 1990-an arus utama pemimpin politik Islam yang menerapkan strategi politik akomodatif dengan pemerintah menolak untuk terus bersikap akomodatif terhadap pemerintahan Soeharto. Bahkan sekelompok pemimpin Islam dari sayap modernis secara jelas menerapkan 'strategi oposisi' terhadap pemerintah. Kemudian seiring dengan kemunculan era reformasi, kekuatan politik Islam nampak mencoba memperkuat perjuangannya melalui panggung partai politik.⁸

⁸ Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 362.

Ada tiga pesta demokrasi yang sudah berlangsung selama era reformasi yaitu pemilu 1999, 2004 dan pemilu 2009. Pemilu 1999 (pemilu pertama pasca keruntuhan Soeharto) sangat ditunggu-tunggu oleh terutama aktifis politik Islam. Mereka berharap pemilu yang akan dilangsungkan dengan jujur, adil dan demokratis ini benar-benar akan membawa kemenangan bagi partai-partai Islam mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Untuk lebih komprehensifnya akan kami gambarkan mengenai dua pesta demokrasi yang sudah berlangsung pada era reformasi tersebut.

Pemilu 1999

Pemilu 1999 adalah pemilu pertama yang dilaksanakan secara demokratis, jujur, langsung dan terbuka. Pada pemilu tersebut terdapat 48 partai peserta pemilu. Partai-partai tersebut terdiri dari berbagai latar belakang ideologi, paham bahkan latar belakang agama. Zainal Abidin Amir mencatat ideologi-ideologi partai yang tampil pada pemilu 1999 yaitu Islam, Pancasila, Sosial Demokrat, Marhaenisme, Demokrasi Religius, dan Sosial Demokrasi Kerakyatan⁹.

Semua partai dengan latar belakang yang berbeda-beda akan bersaing memperebutkan 462 kursi DPR pusat dan menarik simpati lebih dari seratus juta penduduk Indonesia yang memiliki hak memilih. Namun hambatan terbesar yang dialami partai-partai baru termasuk

di dalamnya partai-partai Islam adalah sedikitnya waktu untuk melakukan sosialisasi. Mereka (partai-partai baru) hanya memiliki waktu sekitar 10 bulan untuk melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan, sehingga tidak heran kalau masyarakat terutama di daerah-daerah pelosok negeri ini hanya mengetahui 3 partai (Golkar, PPP dan PDI).

Sementara partai Islam sendiri di masa pasca-Soeharto mengalami polarisasi sangat tinggi, tercerai-berai menjadi 35 partai.¹⁰ Di samping tidak menyatunya partai-partai Islam, para aktifisnya juga sangat yakin bahwa atas nama agama (Islam), partai mereka bisa memperoleh kemenangan pada pemilu 1999 nanti.

Namun ternyata hasil pemilu 1999 menunjukkan kenyataan—yang tidak sesuai dengan harapan sebagian besar aktifis partai politik Islam—bahwa simbol-simbol agama tidak cukup ampuh untuk merebut simpati konstituen, malah sebaliknya konstituen lebih bersimpatik dengan partai-partai yang terkesan ‘dizalimi’ seperti PDIP meskipun bukan partai yang berasaskan agama, malahan berdasar nasionalis sekuler.

Partai-partai Islam meskipun dikumpulkan juga tidak akan sanggup memenangkan pertarungan dengan partai-partai non-Islam. Jumlah perolehan kursi partai-partai Islam pada pemilu 1999 sebanyak 176 kursi, sementara PDIP sebanyak 153 kursi dan Golkar 120 kursi belum lagi partai-partai dari agama lainnya dan partai nasionalis.

⁹ Zainal Abidin Amir, *Peta....* hlm. 283.

¹⁰ Arsekal Salim GP, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1999), hlm. 7.

Meskipun demikian hal yang tak pernah terbayangkan adalah keberhasilan partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah dalam mekkan KH. Abdurahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden RI keempat. Kalau dianalisa kemenangan Gus Dur atas Megawati dalam pemilihan presiden 1999 paling tidak disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, kuatnya konsolidasi di kalangan partai-partai Islam apalagi dengan modal sekitar 176 suara di DPR RI untuk menghadang Megawati. *Kedua*, berhadap-hadapannya dua kekuatan besar yang sama-sama ekstrim dan bisa mengancam keutuhan bangsa ini kalau salah satu di antara keduanya kalah. Dua kekuatan tersebut adalah kubu Habibie yang di-*back up* GOLKAR dan kubu Megawati yang di-*back up* PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan merasa paling berhak atas jabatan presiden. Munculnya kekuatan ketiga (Poros Tengah) menjadi pilihan alternatif demi menyelamatkan bangsa yang hampir saja tenggelam ini, dan pada posisi inilah Poros Tengah menemukan momentumnya yang paling strategis. *Ketiga* yang tak kalah pentingnya adalah terciptanya *power sharing* antara pihak Poros Tengah dengan Golkar mengenai jabatan ketua DPR yang akhirnya dipegang oleh Akbar Tanjung, ketua umum Golkar.

Pemilu 2004

Pemilu 2004 merupakan pemilu kedua pada era reformasi. Jika pemilu 1999 disebut sebagai tonggak awal dari proses demokratisasi di Indonesia, maka pemilu 2004 merupakan pemilu prioritas

dalam masa transisi demokrasi di Indonesia. Pemilu kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya. *Pertama*, karena anggota lembaga-lembaga negara yang akan terbentuk melalui pemilu kali ini dipilih secara langsung oleh rakyat pemilih. *Kedua*, karena ada lembaga baru yang akan terbentuk melalui pemilu kali ini, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). *Ketiga*, karena beberapa tatacara yang diterapkan pada pemilu kali ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, seperti tatacara pencoblosan, tatacara penghitungan suara, penentuan daerah pemilihan, persyaratan peserta pemilu, penetapan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, dan lembaga penyelenggara pemilu.¹¹

Pada pemilu 2004 terdapat 24 partai peserta pemilu. Dari 24 partai tersebut 7 partai merupakan partai Islam yaitu Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bintang Reformasi. Di samping 24 partai peserta Pemilu, masih terdapat partai-partai yang tidak lolos verifikasi KPU sebanyak 26 partai, partai politik yang dibatalkan sebagai badan hukum sebanyak 153 partai, dan partai politik yang tidak memenuhi persyaratan UU No. 31 Tahun 2004 sebanyak 58 partai.¹²

Penetapan hasil pemilu 2004 yang dilakukan oleh KPU pada tanggal 5 Mei

¹¹ Panduan Pemilu Apa dan Bagaimana Pemilu 2004, Komisi Pemilihan umum (KPU), hlm. 3-4.

¹² Lihat *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*, Tim Litbang Kompas Jakarta: Februari 2004.

2004 menyebutkan bahwa menurut hasil penghitungan tersebut jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya ada 124.449.038 (83%), dari yang menggunakan hak pilih itu, suara yang sah ada 113.498.755 dan suara tidak sah 10.957.925 (8,81%), dan yang tidak menggunakan hak pilih ada 23.551.321 orang.

Dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih tadi, yang memilih dengan hanya mencoblos tanda gambar parpol saja ada 54.188.481 dan yang memilih tanda gambar parpol dan calon 59.310.274 (52,26%). Ini berarti bahwa yang mencoblos tanda gambar sekaligus nama calon lebih banyak daripada yang memilih tanda gambar parpol semata.¹³

Nasib partai-partai Islam hampir sama dengan pemilu 1999. Partai yang menjadi pemenang pemilu adalah partai Golkar. Partai-partai Islam (7 partai termasuk PNUI yang tidak memperoleh satupun kursi) hanya memperoleh 231 kursi dari total 550 kursi. Dengan demikian berarti partai di luar partai Islam memperoleh 319 kursi. Golkar sendiri sebagai partai pemenang pemilu 2004 memperoleh 128 kursi.

Berbeda dengan peristiwa yang terjadi pada pemilu 1999, yaitu meskipun partai-partai Islam kalah dalam perolehan suara tapi mereka berhasil mendudukkan Gus Dur sebagai presiden RI yang keempat, pada pemilu 2004 di samping partai-partai Islam menuai kekalahan mereka juga tidak

mampu menggejolak calon presiden-wakil presiden yang berasal dari partai Islam untuk duduk sebagai presiden keenam menggantikan Megawati Soekarno Putri. Bahkan sebaliknya pemilu 2004 berhasil mengantar Susilo Bambang Yudoyono atau yang lebih dikenal dengan SBY sebagai presiden RI terpilih untuk periode 2004-2009, seorang yang berasal dari partai Demokrat yang mayoritas pengurusnya non-Muslim.

Pemilu 2004 khususnya dalam pemilihan presiden-wakil presiden memang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Dalam pemilihan presiden-wakil presiden yang dilakukan secara langsung, kekuatan partai politik tidak begitu dominan walaupun masih tetap diperhitungkan, faktor figur lebih menentukan dalam memenangkan pertarungan. SBY di samping namanya yang meroket menjelang pemilu 2004 juga *image* bahwa dia di'zalimi' oleh Megawati telah mengangkat reputasinya ke posisi puncak sehingga simpati sebagian besar rakyat Indonesia mengalir ke kubunya yang akhirnya berhasil mengantarkannya bersama Yusuf Kalla menjadi pasangan presiden-wapres untuk periode 2004-2009.

Oleh karena itu, menyambut pemilu 2009 di mana sistem pemilihan presiden-wapresnya masih dilaksanakan secara langsung, hendaknya partai-partai politik Islam sudah mulai mencari dan menyiapkan sosok tokoh Muslim yang tidak hanya bisa diterima oleh sekelompok Muslim Indonesia tetapi juga bisa diterima oleh seluruh kelompok atau *firqah* Muslim

¹³ Sumber Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2004. Nama-nama partai yang dicetak tebal merupakan partai-partai Islam peserta pemilu 2004

Indonesia, bahkan kalau perlu bisa juga diterima oleh kalangan non-Muslim untuk dicalonkan menjadi presiden-wapres.

Pemilu 2009

Hasil pemilu 2009 juga kurang lebih sama dengan gambaran yang terjadi pada pemilu 2004 yaitu sama-sama dipuncaki oleh partai non agama (Islam), tetapi dimenangi oleh partai nasionalis (Partai Demokrat). Pemilu 2009 juga mengantarkan pasangan SBY-Boediono menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014. Ini untuk yang kedua kalinya bagi SBY menjadi Presiden Republik Indonesia secara berturut-turut.

Masa Depan Partai Politik Islam Pasca Pemilu 2009

Tesis yang menyatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan seharusnya partai-partai Islam memperoleh kemenangan sebetulnya tidak sepenuhnya benar dan fair. Karena meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim tetapi di dalam masyarakat Muslim Indonesia sendiri terdapat beberapa variabel, dan tidak tunggal apalagi dalam pilihan politik. Penelitian yang dilakukan Clifford Geertz misalnya bisa kita jadikan acuan bahwa menurutnya penduduk Muslim khususnya di Jawa itu terdiri dari tiga klasifikasi yaitu Abangan, Santri dan Priyayi.¹⁴ Dari ketiga klasifikasi masyarakat

¹⁴ Lihat Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, terjemahan, Cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983). Sementara Abdul Munir Mulkhan, dalam melihat realitas bahwa penduduk Indonesia yang lebih dari 87

Muslim Jawa tersebut hanya masyarakat santri-lah yang lebih condong menjatuhkan pilihan politiknya kepada partai-partai Islam, sementara abangan dan priyayi lebih suka memilih partai-partai nasionalis. Dalam masyarakat Muslim santri itupun tidak semuanya akan menjatuhkan pilihan politiknya kepada partai Islam karena perbedaan pandangan, pemahaman dan kerangka berpikir yang digunakan.¹⁵ Masyarakat Muslim Indonesia secara umum juga tidak akan tunggal dalam pilihan politiknya. Hal ini barangkali karena *mode of thinking* dan metodologi yang dipakai berbeda dalam memahami politik. Apalagi

% adalah Muslim tetapi belum memberikan dukungan signifikan pada gerakan dan partai Islam, berpendapat bahwa hal itu merupakan akibat ketidaksesuaian program organisasi atau partai politik Islam dengan kepentingan umat yang mayoritas tinggal di pedesaan, pendidikan rendah, buruh, petani, dan umumnya miskin. Menurut kami Munir Mulkhan lebih melihatnya dari sudut struktur sosial keberagaman penduduk Muslim Indonesia bukan dari sudut pandang strategi yang dipakai oleh masing-masing partai politik Islam dalam menarik simpati pendukungnya. Untuk lebih jelasnya lihat Abdul Munir Mulkhan "Struktur Sosial Keberagaman Pemeluk Islam di Indonesia" dalam jurnal *Al-Jami'ah* Volume 39, Nomor 2, Juli-Desember 2001, hlm. 394-395

¹⁵ M. Syafi'i Anwar mengklasifikasikan tipologi pemikiran politik cendekiawan Muslim (santri) Indonesia khususnya pada era Orde Baru ke dalam enam tipologi. 1) Formalistik 2) substantivistik 3) Transformatik 4) Totalistik 5) Idealistik dan 6) Realistik. Dari keenam tipologi tersebut hanya tipologi nomor 1 dan 4 (Formalistik dan Totalistik) yang akan all out mendukung dan menjatuhkan pilihan politiknya kepada partai-partai Islam, sementara 4 sisanya bisa bervariasi. Yang terpenting adalah aspirasi umat Islam bisa diwujudkan tanpa melihat siapa dan partai apa yang memperjuangkan. Lihat M. Syafi'i Anwar, MA. Dalam *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Cet I (Jakarta: Paramadina, 1995) hlm. 143-184.

setelah melihat dan mengetahui ‘partai’ dan ‘oknum’ politisi Muslim yang hanya menggunakan ‘Islam’ sebagai kendaraan politik. Jadi, kalau pada tiga pemilu di era reformasi partai-partai Islam mengalami ‘kekalahan’ hal itu wajar-wajar saja dan biasa dalam pertarungan politik. Hanya saja legitimasi ‘agama’ pada partai-partai Islam menjadi kurang kuat karena tidak didukung oleh bukti empiris bahwa mereka (partai-partai tersebut) didukung oleh kaum Muslimin Indonesia.

Di samping itu, hal ini membuktikan bahwa embel-embel agama tidak cukup ampuh dipakai untuk menarik simpati dan dukungan konstituen. Realitas menunjukkan bahwa wacana keagamaan belum bisa dijadikan *entry point* untuk merebut dukungan pada parpol yang bernuansa keagamaan. Tapi benarkah hasil pemilu ini merupakan sinyal yang jelas bahwa mayoritas Muslim sudah tidak lagi menganggap penting simbol-simbol Islam dalam politik dan lebih peduli pada substansi? Jika memang demikian, ini mungkin bisa dilihat dari dua arah yang saling terkait. *Pertama*, kaum Muslim lebih peduli untuk menjadikan Islam sebagai etika sosial, lebih mementingkan agar segala urusan kemasyarakatan—termasuk politik—dipengaruhi dan disemangati oleh nilai-nilai agama, seperti kejujuran, keadilan, dan sebagainya. Kesimpulan ini boleh ditarik, mengingat dalam lima belas tahun terakhir “Islam kultural” jelas menampakkan perkembangan yang sangat mengesankan di negeri ini. Jadi

“ketidakpedulian” mereka pada “Islam politik” bukan karena mereka menganggap politik tidak penting, melainkan justru karena meningkatnya kesadaran keagamaan mereka pada hal-hal yang jauh lebih penting daripada simbol. *Kedua*, berkaitan dengan itu, umat Muslim makin percaya bahwa adalah mungkin kepentingan umat Islam diperjuangkan pewujudannya oleh para politisi dari luar lingkungan “Islam politik”, atau bahkan kalangan non-Muslim.¹⁶

Alasan pertama tadi menurut kami lebih sesuai dengan kondisi umat Islam Indonesia dewasa ini. Keberhasilan PKS misalnya bisa kita ambil sebagai sebuah contoh. Partai ini pada pemilu 1999 hanya mampu meraih kurang dari 2 % sehingga tidak lolos *electoral treashold*, tapi pada pemilu 2004 partai ini mampu meningkatkan dukungan lebih dari 600 % dibanding pemilu 1999. Kemenangan PKS yang merupakan partai Islam dan berasaskan Islam ini menurut hemat kami lebih merupakan kepintaran aktifisnya dalam mengemas jargon-jargon yang akan disuguhkan pada waktu kampanye dan terutama lagi ke-*istiqamah*-an para aktifisnya dalam memegang dan menjalankan jargon-jargon tersebut pasca pemilu. Misalnya jargon “Anti-korupsi” dan “bersih dan peduli” menjadi iklan yang sangat ampuh untuk menarik simpati konstituen. Penulis tidak yakin bahwa *voter* yang memilih PKS karena alasan ‘Islam’ semata di belakangnya tapi lebih karena tertarik pada jargon-jargon yang selalu

¹⁶ “Mengapa Partai Islam, Mengapa Kalah” dalam www.google.politik Islam.

didengung-dengungkan dan dipraktekkan dalam aksi-aksi politiknya. Dari 8.325.020 suara pemilih PKS pada pemilu 2004, penulis berkeyakinan bahwa hanya sekitar 20 % nya saja atau tidak jauh dari hasil perolehan PKS pada pemilu 1999 yaitu 1.436.565 yang merupakan pemilih inti dan benar-benar aktifis PKS. Selebihnya atau 80 % nya merupakan 'orang lain' yang tertarik dengan jargon-jargon politiknya dan suara tersebut bisa berubah-ubah dan berpindah-pindah dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Namun satu hal yang perlu dicermati dari PKS adalah mewaspadai agar prilakunya bukan basa-basi politik yang sifatnya jangka pendek. Dengan kata lain, bukanlah strategi politik untuk meraih kekuasaan belaka, melainkan sebuah visi dan paradigma baru Islam politik di Indonesia.¹⁷ Kekhawatiran ini terbukti ketika misalnya banyak kader (tokoh) PKS terlibat korupsi, menonton video porno saat siding paripurna hingga gravitasi seks.

Di samping alasan-alasan di atas, alasan lainnya adalah konflik internal di tubuh partai-partai Islam yang ditengarai menjadi faktor yang menyebabkan partai-partai tersebut ditinggalkan oleh konstituennya. Selama 'cakar-cakaran' antar elit partai Islam ini masih terus berlangsung bisa dipastikan ini akan menyebabkan kesuraman bagi masa depan partai-partai Islam di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, etika dan moralitas

¹⁷ M. Imdadun Rahmat dan Khamami Zada, "Agenda Politik Gerakan Islam" Baru dalam Tashwirul Afkar, Edisi No. 16 Tahun 2004. hlm. 42.

dalam komunikasi politik menjadi sesuatu yang niscaya sebagaimana pernyataan Dr. Maswadi Rauf (1993) yang dikutip oleh Muchammad Yuliyanto. Beliau menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan proses komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan.¹⁸

Ke depan partai-partai politik Islam seyogyanya lebih mengedepankan dimensi substantivistik ketimbang formalistik-legalistik agar supaya konstituennya bisa bersimpati untuk menjatuhkan pilihan politiknya kepada partai-partai Islam. Kepiawaian dalam mengemas jargon-jargon politik menjadi suatu *skill* yang harus dimiliki oleh para aktifis partai politik Islam. Kemudian sistem yang sebaiknya diterapkan di Indonesia adalah sistem yang tidak hanya baik untuk umat Islam, tetapi juga sekiranya akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia. Karena sejatinya agama dalam keasliannya tidak memaksakan atau memperjuangkan suatu sistem sosial-politik yang eksklusif.¹⁹

Simpulan

Keberadaan partai-partai 'Islam' dalam sistem perpolitikan Indonesia selain untuk menyemarakkan dinamika politik tanah air juga sangat berguna untuk menambah referensi dan bahkan bisa menjadi 'alternatif' terhadap stagnasi sistem politik konvensional. Bangsa Indonesia yang

¹⁸ Muchammad Yuliyanto, Meneropong Masa Depan Parpol Islam, Suara Merdeka, 6 Juni 2002.

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999) hlm. 52 dan 55.

plural ditambah dengan berwarna-warninya partai politiknya semakin menambah dan memperkuat *national characteristic* nya.

Kekalahan partai-partai politik Islam dalam dua kali pemilu pada era reformasi bukan merupakan *the end* dari sejarah politik Islam Indonesia dan kesuraman masa depannya asalkan para aktifis parpol Islam berani belajar dari sejarah untuk kemudian menata ulang strategi yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Di samping itu, tradisi konflik antar elit partai Islam yang hanya memikirkan untuk meraih kedudukan strategis dalam partai dan pemerintahan seharusnya ditinggalkan untuk selanjutnya mencurahkan perhatian pada *empowering*

dan peningkatan kesejahteraan konstituen dan bangsa pada umumnya. Apalagi pemilih pada saat sekarang ini sudah cerdas dan tidak mudah dibodohi, mereka lebih melihat bukti daripada janji-janji apalagi mengataskan agama demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Terlepas dari realitas politik yang dialami partai politik Islam, penulis masih berkeyakinan bahwa masa depan partai politik Islam di Indonesia akan cerah dan bisa lebih berbuat banyak demi kemaslahatan agama dan kesejahteraan umat Islam dan bangsa dan negara secara umum.

Daftar Pustaka

- Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekausaan di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Amir, Zainal Abidin, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003.
- Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Cet I Jakarta: Paramadina, 1995.
- Effendi, Bahtiar, *Islam and State: The Transformation of Political Ideas and Practices In Indonesia*, alih bahasa Ihsan Ali Fauzi, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, terjemahan, Cet ke-2, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983
- Hakim, Sudartono Abdul, *The Partai Persatuan Pembangunan The Political Journey of Islam Under Indonesia's New Order (1973-1987)*. Institute of Islamic Studies, Mc Gill University, Montreal, Canada.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2004.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 1999.
- Madjid, Nurcholish, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Panduan Pemilu Apa dan Bagaimana Pemilu 2004, Komisi Pemilihan umum (KPU).
- Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi*

- dan Program 2004-2009*, Tim Litbang Kompas Jakarta: Februari 2004.
- Radi, Umaidi, *Strategi PPP 1973-1982*, Jakarta: Integrita Press, 1998.
- Salim, Arsekal, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*, Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, 1999.
- www.google.politik Islam : “Mengapa Partai Islam, Mengapa Kalah”
- Yulianti, Rahmani Timorita, *Reaktualisasi Strategi Politik Islam di Indonesia*, Al Mawarid, edisi ke-7, Yogyakarta: FIAI Jur Syari’ah, 1999
- Yuliyanto, Muchammad, *Meneropong Masa Depan Parpol Islam*, Suara Merdeka, 6 Juni 2002.